**PELAKSANAAN KONTRAK HARGA SATUAN PADA PAKET PERKERJAAN
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PENGAMANAN PANTAI PULAU TERLUAR
PROVINSI RIAU ANTARA PT.ALEX PUTRA SAKTI DENGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUNGAI DAN PANTAI DI DESA
CENTAI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

Oleh : Ananda Fernando Putra

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Setia Putra, S.H., M.H

Alamat : Jln karya cita1 Blok A No 14 bukitraya Pekanbaru

Email : anandafernandop@gmail.com -Telepon : 081276120230

ABSTRACT

Currently, in the implementation of goods and services procurement work, including construction services, the total costs of which are borne by the State Budget (APBN) and the Regional Expenditure Budget (APBD), must comply with statutory provisions. To carry out development, the government needs other parties, after that the government takes the option of conducting a selection in the form of an auction. After obtaining the winning bidder, the Government will draw up a Construction Work Contract. In the implementation of the Construction Work Contract between the Commitment Making Officer (PPK) and PT Alex Putra Sakti in the construction of Coastal Security for the Outermost Islands of Riau Province in Centai Village, Merbau Island District, Meranti Regency, the implementation procedure must comply with applicable regulations. Therefore, the purpose of this study was to find out the implementation of unit price contracts in the construction work package for the construction of coastal safeguards in the outermost islands of Riau Province between PPK PT Alex Putra Sakti and officials making river and beach commitments in Centai Village, Merbau Island District, Meranti Regency.

The type of research in this paper is sociological legal research, namely research conducted by identifying and how effective it is in society or reviewing the state of the problem associated with the applicable legal aspects and judging from its descriptive nature, namely describing the process. From the results of the research, there are two main things: First, that the Procedure for Implementation of the Construction Contract for the construction of beach security in the Meranti Village of Centai Regency is running in accordance with the agreed work contract and in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1999 concerning services construction. Second, in the process of carrying out the completion of the work there were obstacles experienced by the contractor, namely the implementation exceeded the time limit for 14 days so that the ppk was required to make compensation for a delay of 1/1000 of the contract value that had been agreed upon, this delay was due to high tide or volume from rising sea water o that the construction work of protecting the coast experienced delays in its implementation covid19.

Keywords: *Implementation of development construction work contract*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia cenderung untuk memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.¹ Pergaulan dalam hidup merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu hal, maka timbullah suatu perjanjian. Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.²

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ Perjanjian berasal dari kata janji yang memiliki pengertian suatu ketentuan dalam suatu perjanjian yang mengandung suatu kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Suatu perjanjian harus dianggap sebagai suatu rangkaian janji-

janji.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.⁵

Menurut R. Subekti, diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. dalam perjanjian, diperbolehkan membuat undang-undang sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan itu".⁶

Membahas suatu perjanjian berarti sama dengan membahas tentang subjek hukum karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat suatu perjanjian. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu orang pribadi atau badan hukum.⁷

Perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan oleh subjek hukum manusia pribadi dengan badan hukum maupun dengan badan hukum dengan badan hukum. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama tidak memuat ketentuan mengenai larangan perjanjian kerjasama antar subjek hukum (manusia dan badan hukum). Menurut CST

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1986.hlm.40

² Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2016,hlm 61

³ Wirjono Prodjodikoro, *asaz-asaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973,hlm.9

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya paramita, Jakarta, 1978, hlm. 68.

⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Tanpa Tahun Terbit, hlm.458

⁶ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Inter Masa, Jakarta, 1990, hlm.14.

⁷ Hardijan Rusli, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.199

Kansil dan Christine S.T Kansil, badan hukum juga merupakan subjek hukum karna juga dapat bertindak hukum seperti manusia selain itu, badan hukum juga merupakan kumpulan manusia pribadi dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku.⁸

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih⁹. Selanjutnya dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: Perikatan adalah memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu¹⁰. Dengan mengacu pada kedua ketentuan diatas dapat diketahui, bila seseorang telah menanda tangani suatu kontrak, berarti dia telah memahami konsekuensi yuridis. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”¹¹.

Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi suatu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sahnya suatu

perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni adanya: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya yang dimana maksudnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak; 2. Kecakapan membuat suatu perikatan dimana yang di maksud Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki an 19 tahun bagi wanita. Jika menurut UU Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Ini berdasarkan KUH Perdata; 3. Suatu pokok persoalan tertentu yaitu yang di perjanjikan harus jelas; 4. Sebab yang halal setiap perjanjian harus sesuai dengan syariat yang ada.¹²

Pada Bab IV Bagian Pertama Pasal 14 Undang-Undang Jasa Konstruksi berbunyi: “Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari a. pengguna jasa yaitu pemilik yang meberikan perkerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi; b. penyedia jasa yaitu pemberi layanan atau orang yang akan melakukan perkerjaan tersebut.”¹³

Dalam perjanjian kerja ini terdapat Hak dan Kewajiban timbal-balik antara PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi sebagai berikut a.

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 2. Meminta laporan-laporan secara periodik

⁸ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2000, hlm.89-90.

⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkut ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan, tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan

kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.¹⁴

Setelah timbulnya hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen sungai 2 dengan Penyedia, maka syarat-syarat yang berlaku di dalam perjanjian kerja kedua belah pihak harus dipenuhi. Proses perjanjian kerja antara Dinas pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai II Provinsi Riau sebagai pemberi kerja, mengadakan tender kepada perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai penyedia jasa, perusahaan-perusahaan melakukan penawaran terlebih dahulu, Setelah penawaran-penawaran yang masuk akan langsung dinilai oleh kelompok kerja yang telah disusun oleh dinas terkait, maka di pilihlah pemenang yang menawar dengan harga terendah dari nilai tender dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan kelompok kerja itu melakukan verifikasi data untuk membuktikan dari data-data yang telah di upload oleh penawar tersebut nyata adanya.

Pada uraian ini adanya syarat-syarat dan ketentuan kontrak yang tertuang pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). yang harus dipenuhinya oleh pengusaha atau Penyedia yaitu adanya tenggat waktu untuk menyelesaikannya suatu pekerjaan “selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender”, atau adanya denda apabila mengalami keterlambatan, terhadap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan Penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum Pajak

¹⁴ Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan PT.Alex Putra Sakti

Penambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu tulisan yang berjudul: **“Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Pada Paket Perkerjaan Konstruksi Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Terluar Provinsi Riau Antara PT ALEX PUTRA SAKTI Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai Dan Pantai Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Terluar Propinsi Riau Antara PPK PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan pantai Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan kontrak Harga Satuan Pada Paket Perkerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Provinsi Riau Antara Pejabat Pembuat Komitmen sungaiII dengan PT Alex Putra Sakti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Terluar Propinsi Riau Antara PPK PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan pantai Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti.

- b. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Akibat Keterlambatan Penyelesain Paket Perkerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Yang Di Kerjakan Oleh PT Alex Putra Sakti Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis terkait perjanjian kontrak kerja.
- 2) Bagi Akademis, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini berguna sebagai perbandingan atau sumber penelitian-penelitian karya ilmiah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi PT.Alex Putra Sakti, Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum khususnya tentang hukum keperdataan mengenai perjanjian kontrak kerja.
- 2) Bagi Pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai, Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai perjjajian dan sanksi apa saja yang dapat di terapkan apabila terjadi wanprestasi.

- 3) Bagi para pihak, Hasil penelitian ini dapat memberikan kepada para pihak pengetahuan tentang hal apa saja yang dapat timbul dari suatu perjanjian.

D. Kerangka Teori

1. Teori perjanjian

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁵ M. Yahya Harahap Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁶

Asas-asas hukum perjanjian (kontrak) adalah Asas konsensualisme (*consensualism*) adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; dan Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), bebas mengenai

apa saja yang diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum.¹⁷

2. Teori konstruksi bangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹⁹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat²¹.
2. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan menertima upah²²

¹⁵ Munir Fuady, Arbitrase Nasional; *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.2.

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁷ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.49.

¹⁸ Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka

¹⁹ Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa

²⁰ Pusat Bahasa (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

²¹ f.xDjumialji.1987.perjanjian pemborongan.jakarta:Bina Aksara hlm1

²² f.xDjumialji.1994.perjanjian kerja.jakarta:BumiAksara hlm19

3. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan selesai.²³
4. Perikatan adalah memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu²⁴. Dengan mengacu pada kedua ketentuan diatas dapat diketahui, bila seseorang telah menanda tangani suatu kontrak, membawa konsekuensi yuridis.
5. Kontruksi bangunan adalah susunan (model, tataletak) suatu bangunan, misalnya kontruksi rumah, kontruksi gedung, kontruksi jembatan, dan lain-lain. Dalam Bahasa Belanda istilah *constructie* artinya stuktur atau kontruksi.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi dan bagaimana efektivitas berlaku di masyarakat²⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru sebagai kantor pusat PT

Alex Putra Sakti dengan alasan pada kantor inilah perjanjian pekerjaan di buat dan diadakan oleh Pejabat pembuat sungaiII Provinsi Riau dengan PT Alex Putra Sakti sebagai kontraktor. Serta disini pula penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini.

3. Populasi

Objek penelitian ini ialah seluruh yang terlibat dalam pekerjaan kontrak kerja pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan pengamanan pantai di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah Data Primer, Data yang diperoleh langsung dari para responden” dengan cara menggunakan wawancara. Data primer ini berupa data lampiran surat perjanjian kerja (kontrak), bentuk dan cara pelaksanaan pekerjaan tersebut; Data yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:²⁷

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu yang di maksud bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang masih menjadi bahan hukum positif, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kuhperdata; Undang Undang No 27 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi; Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai Perikatan;

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵

[https://repository.itny.ac.id/id/eprint/1052/8/8_BAB%20II.Konstruksi bangunan](https://repository.itny.ac.id/id/eprint/1052/8/8_BAB%20II.Konstruksi%20bagunan)

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta : 1982. hlm. 33

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 95.

Peraturan Pemerintah NO.22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.14/Prt/M/2020 Tentang Standard An Pedoman Pengadaan Perkerjaan Kontruksi Melalui Penyedia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut Studi Pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara²⁸ langsung dengan karyawan PT Alex Putra Sakti yaitu Bapak Andri Yudhi S.T dan Bapak Benny Mendra S.T untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan juga dengan pihak terkait.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisi data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan dijumpai teori-teori²⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam hukum dijumpai istilah asing (bahasa belanda) *Overeenkomst*, (bahasa inggris) *Contract/Agreement*, dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum dikenal sebagai “Kontrak” atau “Perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Namun harus dinyatakan bahwa kontrak dan perjanjian tidak identik satu sama lain sama sekali dan setiap istilah singkatan untuk, tujuan independen individu dengan sendirinya.

B. Tinjauan umum tentang kontrak konstruksi

Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari *construction contract*. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang

²⁸ Wawancara penulis dengan PT.Alex Putra Sakti

²⁹ Aslim Rasyad, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20

dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Kontrak kerja konstruksi merupakan: “Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa sedangkan Perjanjian kerja konstruksi adalah suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan menertima upah³⁰ dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi” (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³² Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³³

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³⁴

BAB III

³⁰ f.x Djumialji.1994.perjanjian kerja.jakarta:BumiAksara hlm19

³¹ Salim H.S, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.90

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 18.

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.³⁵

B. Gambaran Kecamatan Pulau Merbau

Kecamatan ini memiliki luas 1109km dengan populasi 15.309 jiwa pada tahun 2017. Terdiri dari perempuan sebanyak 7.496 jiwa dan laki-laki 7.813 jiwa. Mereka berdiam di 7 desa.dengan penduduk terbanyak berada di desa centai.³⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Terluar Propinsi Riau Antara PPK PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai II Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, Hlm. 1

³⁵ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+kabupaten+meranti> di akses 9februari 2023

³⁶ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/382 diakses 9 februari 2023

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana.³⁷

Pada perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan pengamanan pantai antara PPK PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dilihat dari bentuk perjanjiannya adalah secara tertulis. Disini dijelaskan bahwa bentuk perjanjian pemborongan pengamanan pantai adalah dibuat secara tertulis.³⁸

Proses Perjanjian yang dilakukan oleh PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai sesuai dengan ketentuan diatas yaitu pada Angka 1, 2, dan 3 maka secara singkat penulis akan memaparkan secara data terkait hasil dari pemenang tender jasa konstruksi perjanjian kerja yang mana kelompok kerja dari dinas terkait yang menjadi jurinya dan memberikan penilaian langsung, maka bersama ini pada tender pelaksanaan pembangunan pengamanan pantai pulau terluar di kabupaten meranti.

Pelaksanaan pembangunan ini diawali dengan pihak pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai melakukan pengadaan lelang secara terbuka kepada setiap kontraktor yang ada di wilayah riau, dan menilai kelayakan berupa budget serta pengalaman dalam

melakukan proyek, dalam hal ini pelengan di ikuti sebanyak 22 kontraktor.

Ukuran untuk menentukan pelulusan adalah penawaran yang paling menguntungkan bagi Negara dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai calon pemenang, dengan memperlihatkan keadaan umum dan keadaan pasar, baik untuk jangka pendek atau jangka menengah. Dalam praktek pelaksanaan pelelangan, penentuan pelulusan pelelangan didasarkan atas penawaran yang terendah yang dapat dipertanggungjawabkan (*the lowest responsible bid*) maka dengan ini terpilih lah PT.Alex Putra Sakti sebagai pemenang lelang.

Sebelum dimulainya pekerjaan yang telah disepakati oleh PT Alex Putra Sakti dengan pemberi kerja, maka terlebih dahulu setelah melakukan penawaran adalah membuat jaminan pelaksanaan yang telah disetujui oleh direktur PT Alex Putra Sakti sebagai ikatan yang akan mengerjakan pekerjaan itu, jaminan itu dibuat kepada Bank sebagai Garansi bahwa pekerjaan itu dapat di mulai dengan adanya jaminan dari Bank. Barulah dibuat perjanjian kontrak setelah membuat jaminan Bank Garansi, antara yang memuat aturan-aturan dan kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Setelah disepakatinya kontrak kerja tersebut PT. Alex Putra Sakti diberikan uang muka oleh pemberi kerja sebesar 30% dari nilai kontrak, lalu PT. Alex Putra Sakti memberikan jaminan uang muka kepada Bank sebesar 10% dari uang muka yang telah

³⁷ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Inter Masa, Jakarta, 1990, hlm.4

³⁸ Surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan kontruksi pembangunan

pengaman pantai pulau terluar provinsi riau di desa centai kecamatan pulau merbau kab.kepulauan meranti tahun 2021

diberikan oleh pemberi kerja tersebut. Setelah melakukan tahap-tahap tersebut PT. Alex Putra Sakti dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh pemberi kerja, tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam perjanjian kontrak kerja, dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya antara PPK PT. Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti melakukan perjanjian yang dilakukan secara tertulis.

Oleh karena itu pengguna dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui perjanjian kontrak kerja yang di buat oleh ppk dan PT Alex Putra Sakti yaitu pekerjaan harus di selesaikan dalam waktu 210 hari dan apabila mengalami keterlambatan di kenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari nya dengan syarat syarat dan ketentuan pada kontrak kerja yang telah di buat.

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan setelah diterbitkan nya surat perintah mulai kerja yaitu pada tanggal 23 maret 2021 yang mana surat ini telah di setujui oleh dinas pekerjaan umum dan di tanda tangani oleh direktur PT Alex Putra Sakti³⁹. Kemudian setelah selesai nya Pelaksanaan pekerjaan ini maka di lakukan PHO yaitu kegiatan penyerahan pertama kali hasil pekerjaan oleh kontraktor kepada pihak pemilik proyek yaitu pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai yang selanjut nya memasuki masa pemeliharaan selama 365 hari kalender kemudian apabila telah 365hari maka dilakukan FHO yaitu proses akhir serah terima hasil

pekerjaan secara menyeluruh dari kontraktor kepada pejabat pembuat komitmen yang di nyatakan dalam Berita acara serah terima akhir. maka dengan dikeluarkan surat berita acara serah terima akhir maka selesai lah perjanjian yang dilakukan oleh PT Alex Putra Sakti Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai Dan Pantai Provinsi Riau.

B. kendala dalam Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Pada Paket Perkerjaaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Provinsi Riau Antara Pejabat Pembuat Komitmen sungaiII dengan PT Alex Putra Sakti

PT. Alex Putra Sakti menjelaskan pada penulis bahwa wanprestasi dalam perjanjian kerja bersama kontrak konstruksi ini antara PT. Alex Putra Sakti dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sungai tidak dipenuhinya pekerjaan yang diperjanjikan:⁴⁰

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai atau berbeda dengan yang diperjanjikan
2. Apabila dalam pembangunan pengaman panati tidak sesuai dengan spesifikasi yang di perjanjikan
3. Apabila penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada waktunya sebagaimana yang telah di perjanjikan
4. Apabila pihak kedua telah melakukan pelanggaran dan diberi teguran oleh pihak pertama atau pihak pemberi kerja sebanyak tiga kali, maka pihak pertama atau pihak pemberi kerja berhak membatalkan perjanjian secara sepihak

³⁹ Surat perjanjian kerja *PT Alex Putra Sakti*

⁴⁰ *Ibid.*

Akibat dari wanprestasinya pelaksanaan kerja, maka akan mengakibatkan perjanjian pembangunan pengaman pantai ini yang dilakukan antara pemberi kerja dengan pelaksanaan kerja menjadi batal, akan tetapi dalam kontrak kerja memuat syarat-syarat umum kontrak yang mana adanya toleransi apabila dalam pelaksanaan kerja adanya hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan. Bunyi dari syarat-syarat umum kontrak tentang perpanjangan waktu adalah “Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.”⁴¹

Kendala kendala yang dihadapi oleh PT Alex Putra Sakti dalam pekerjaan pembangunan pengaman pantai Kepulauan Meranti Desa Centai ini yang disampaikan dari hasil wawancara ialah dikarenakan beberapa kendala diantaranya:

a. Faktor alam

1. Faktor naik nya tinggi pasang air laut luar perkiraan pada Kabupaten Meranti yang akan di lakukan pemabangunan pengaman pantai yang mengakibatkan terhentinya pemasangan batu yang mana hal ini tidak dapat di prediksi

beberapa lama nya sehingga terhambatlah pembangunan pengaman pantai ini

2. Surutnya air laut yang terlalu jauh yang mengakibatkan terhambat nya proses pembongkaran material berupa batu karena ponton tidak bisa mendekat ke titik lokasi kerja.

b. Faktor sumber daya manusia

1. Kelalaian SDM yang mana hal ini sering terjadi di lapangan sehingga hal ini dapat juga menimbulkan keterlambatan pekerjaan dan kerugian biaya materil seperti saat melakukan pekerjaan lalai nya operator alat berat sehingga mengakibatkan jatuh nya alat berat kelaut sehingga perusahaan akan mengalami kerugian materil seperti tambahan biaya untuk mengeluarkan alat berat dan perbaikannya kemudian waktu pekerjaan mengalami keterlambatan akibat kurang nya sumber daya, maka terjadilah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dipekerjakan.

c. Faktor COVID 19

1. Akibat dari ada nya wabah Covid-19 yang mana terjadinya pengurangan realisasi pekerjaan untuk memenuhi penambahan pembelian K3 Covid yang mana perencanaan biaya anggaran pekerjaan ini di lakukan sebelum ada nya wabah Covid-19 yaitu pada tahun 2018 dan pekerjaan baru di tetapkan pekerjaanya untuk dikerjakan pada tahun 2021 oleh hal ini menimbulkan nilai

⁴¹ *Ibid.*

beban baru yang membuat kurangnya Profit bagi perusahaan akibat dari berbelanja untuk penyelenggaraan K3 (Covid-19).

Akibat dari faktor faktor diatas pihak dari PT Alex Putra Sakti mendapatkan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara non litigasi yaitu dengan melakukan negosiasi sehingga diberikan toleransi dari pihak pemberi kerja dengan memberikan perpanjangan waktu empat belas hari dari batas waktu yang diperjanjikan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.

Maka dari itu PT Alex putra Sakti tidak diwajibkan untuk membayar keterlambatan karena di berikan penambahan waktu 14 hari kalender dan apabila pihak PT Alex Putra Sakti tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan dari tambahan waktu yang telah di berikan maka akan di kenankan denda dengan membayar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum ppn, sedang kan untuk penyelesaian masalah nomor 4 yang di timbulkan akibat dari COVID-19 yaitu penyelesaian masalah ini dengan cara pemangkasan pekerjaan yang telah disetujui kedua pihak dengan contoh pekerjaan yang seharusnya di kerjakan sepanjang 1Km maka di pangkas mejadi 900 meter hal ini di karenakan penggunaan biaya untuk penyelenggaraan K3 Covid yang di ambil dari anggaran realisasi proyek,hal ini disampaikan langsung oleh PT.Alex Putra Sakti.Maka dapat disimpulkan bahwa selama pekerjaan belum selesai atau belum diserahkan kepada pemberi kerja,resikonya masih harus dipikul oleh pelaksana kerja yang masih merupakan penanggung jawab sampai pada saat pekerjaan itu secara yuridis

selesai dan diserahkan kepada pemberi kerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan pengamanan pantai kabupaten meranti desa centai ini tidak berjalan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati di karenakan mengalami beberapa masalah. tetapi untuk pekerjaannya telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi.
2. Pembangunan pengamanan pantai Kabupaten Meranti Desa Centai ini menemui kendala antara lain adalah pelaksanaannya melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan, karena adanya air pasang atau volume dari air laut naik dan kendala hingga menghambat pekerjaan pembangunan pengamanan pantai pada Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti dan Pembangunan pengamanan pantai kabupaten meranti desa centai ini terdampak juga oleh faktor Covid19 sehingga hal ini menimbulkan kurangnya profit bagi perusahaan dan kurangnya hasil pekerjaan yang di terima oleh pejabat pembuat komitmen sungai dan pantai.

B. Saran

1. Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui Undang-Undang terkait kedudukan alat bukti khusus tindak pidana kekerasan juga mempertimbangkan keterangan dari korban dan fokus melakukan

perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

2. Karena adanya kendala pada saat melakukan pekerjaan, maka agar dalam kontrak dapat diperpanjang waktunya pada saat membuat kontrak karena melihat dari tender pekerjaan yang akan dikerjakan karena dilihat dari faktor alam tidak dapat dicegah pada saat pembangunan karena terjadinya air pasang atau naiknya volume air.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Alwi, hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Djumialji, F.X., *Perjanjian Kerja*, BumiAksara, Jakarta, 1994.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Tanpa Tahun Terbit.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- H.S, Salim, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hardijan Rusli, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/382 diakses 9 februari 2023

[https://repository.itny.ac.id/id/eprint/1052/8/8_BAB%20II.Konstruksi bangunan](https://repository.itny.ac.id/id/eprint/1052/8/8_BAB%20II.Konstruksi%20bagunan)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+kabupaten+meranti> di akses 9februari 2023

- Irsan, Koesparmono, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2016.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2000.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja,Peraturan Perusahaan,dan Perjanjian Kerja Bersama*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *asaz-asaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.
- Prodjodikoro, Wirjono, *asaz-asaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Depok, 1993.

- Soebekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT.Inter Masa, Jakarta, 1990.
- Soebekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT.Inter Masa, Jakarta, 1990.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta : 1982.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya paramita, Jakarta, 1978.
- Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan
PT.Alex Putra Sakti
- Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi